

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguraikan pengaturan pemberian obat secara langsung oleh tenaga medis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menganalisis dan menemukan penegakan peraturan pemberian obat secara langsung apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis ketika memberikan obat secara langsung. Menganalisis dan menemukan rekonstruksi pengaturan pemberian obat secara langsung oleh tenaga medis yang berbasis nilai keadilan bermartabat guna memperbaiki pelayanan kesehatan bagi masyarakat di masa yang akan datang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan realitas maknawi yang berada di alam subjektiva para warga, tokoh masyarakat, ahli, dan kalangan birokrat serta meneliti bahan perundang-undangan, bahan pustaka atau data sekunder.

Penelitian bersifat eksplanatoris dalam menjelaskan pelayanan publik pada bidang kesehatan oleh birokrasi pemerintah daerah saat ini.

Paradigma yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, karena tiap fenomena sesungguhnya merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat.

Penelitian menemukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam prinsip pengaturan pemberian obat secara langsung oleh tenaga medis. Masyarakat masih belum dapat mengubah budaya, pemahaman bahwa periksa ke praktek dokter selalu diikuti dengan pemberian obat secara langsung oleh tenaga medis. Akibatnya tenaga medis yang sudah terbiasa memberikan obat langsung akan menghadapi tuntutan hukum karena dianggap melebihi kewenangan dengan memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien.

Kurangnya pembinaan dan pengawasan karena kemampuan dari Dinas kesehatan dan organisasi profesi medis sebagai bentuk tanggung jawab penyampaian informasi pemerintah yang harus diketahui oleh masyarakat termasuk tenaga medis.

Agar dapat dicapainya suatu rekonstruksi yang ideal (yang berkeadilan bermartabat) dari prinsip pengaturan pemberian obat secara langsung oleh tenaga medis pasien akan lebih cepat dan mudah mendapatkan obat, sedangkan tenaga medis akan mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.

Rekonstruksi dari segi struktur dapat dilakukan dengan merumuskan ketentuan dalam undang-undang bahwa tenaga medis diberikan wewenang memberikan obat langsung terbatas pada 144 diagnosa penyakit yang harus tuntas di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

KataKunci : Pemberian obat langsung, Tenaga medis, Keadilan Bermartabat.

ABSTRACT

This study aims to describe and describe the direct administration of medicines by medical personnel according to the laws and regulations in force in Indonesia. Analyze and discover the enforcement of regulations for administering drugs directly if there are violations committed by medical personnel when giving drugs directly. Analyze and discover the reconstruction of drug administration arrangements directly by dignified justice-based medical personnel to improve health services for the community in the future.

This type of research is a sociological juridical research that is a legal research method carried out with meaningful reality that is in the realm of subjectivity of citizens, community leaders, experts, and bureaucrats as well as examining legislation, literature or secondary data.

Explanatory research in explaining public services in the health sector by the current local government bureaucracy.

The paradigm used in this study is the constructivism paradigm, because each phenomenon is actually the result of the construction (perception) of each individual or society.

The study found that there are still weaknesses in the principle of regulating the administration of drugs directly by medical personnel. The public still cannot change the culture, understanding that seeing a doctor's practice is always followed by direct administration of drugs by medical personnel. As a result, medical personnel who are accustomed to providing drugs directly will face lawsuits because they are considered to exceed authority by providing pharmaceutical services to patients.

The lack of guidance and supervision is due to the ability of the Health Service and medical profession organizations as a form of responsibility for the delivery of government information that must be known by the public, including medical personnel.

In order to achieve an ideal reconstruction (with dignified justice) from the principle of direct drug administration by the patient's medical staff it will be faster and easier to obtain drugs, while the medical staff will get legal protection in carrying out his profession.

Reconstruction in terms of structure can be carried out by formulating provisions in the law that medical personnel are given the authority to provide direct drugs limited to 144 diagnoses of diseases that must be completed in a first level health care facility.

Keywords: Direct drug delivery, Medical personnel, Dignified Justice.